



**REINTERPRETASI PASAL 9 KONSTITUSI 1947 JEPANG:  
POTENSI ANCAMAN DALAM KOMITMEN JEPANG  
PADA WAR ON TERROR**

**Skripsi**

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata I

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

**Penyusun:**

**Nama : Damartyas Murti Wredhanto**  
**NIM : 14010414140088**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : **Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang: Potensi Ancaman Dalam Komitmen Jepang Pada War On Terror**

Nama Penyusun : Damartyas Murti Wredhanto

NIM : 14010414140088

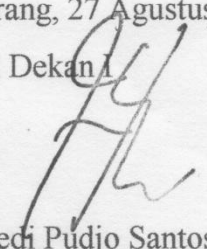
Program Studi : S-1 Hubungan Internasional

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata I**

  
 Dekan  
 Dr. Sunarto, M.Si  
 NIP. 19660727 199203 1 001


Semarang, 27 Agustus 2018

Wakil Dekan

  
 Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si  
 NIP. 19610510 198902 1 002



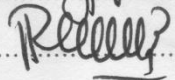
**Dosen Pembimbing:**

1. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D.

  
 (.....)

**Dosen Penguji Skripsi:**

1. Andi Akhmad Basith Dir, S.I.P, MA, MEI
2. Shary Charlotte, S.IP, MA.
3. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D.

  
 (.....)  
  
 (.....)  
  
 (.....)

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA\*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Damartyas Murti Wredhanto
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010414140088
3. Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/25 November1996
4. Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
5. Alamat : Puri Asri Perdana Blok E No. 8, Padangsari,  
Banyumanik, Semarang

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi/TA) yang saya tulis berjudul:

**Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang: Potensi Ancaman dan Komitmen  
Jepang pada War On Terror**

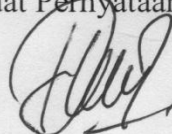
adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila di kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 28 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan;



Damartyas Murti Wredhanto

NIM. 14010414140088

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rencana-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini demi memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan baik secara material dan moral, dan juga mendidik saya dan terus mendampingi saya hingga saat ini.

Kemudian ucapan terimakasih juga saya persembahkan kepada Kepala Departemen Hubungan Internasional, dosen wali, sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi saya, Ibu Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D, yang telah menyediakan waktu, tenaga, perhatian, dan juga pikiran demi mengarahkan saya baik dalam penyusunan skripsi ini mapupun selama saya menempuh studi di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Tidak lupa kepada ibu Shary Charlotte, S.IP, MA. dan Bapak Andi Akhmad Basith Dir, S.IP, MA, M.EI. selaku dosen penguji sidang skripsi saya yang memberikan tambahan pengetahuan untuk berkembangnya skripsi saya yang jauh dari kata sempurna ini.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Nanda Eka Prasetya, Afifah Veriyana Sekarsari, Nuharani Savitri, Elingga Giusti Aichel Miranda, Fathnisa Tya Damajanti, Faris Hersanda, Yoga Alghazi, Christian Silitonga, dan Yoga Arfiansyah Firdaus yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, membantu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, dan memberikan dukungan secara moral kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan juga bagi penulis di masa yang akan datang.

Semarang, 28 Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Kerangka Teori .....	5
1.3.1. Ontological Security .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.4.1. Tipe Penelitian .....	8
1.4.2. Jangkauan Penelitian .....	9
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II      PERKEMBANGAN JEPANG PASCA PERANG DUNIA II</b>	
<b>DAN DINAMIKA POLITIK DI ASIA TIMUR .....</b>	<b>13</b>
2.1. Jepang dan Peranannya dalam Perang Dunia I dan II .....	13
2.2. Perkembangan Konstitusi: Konstitusi Meiji menjadi Konstitusi	
1947 .....	14
2.2.1. Konstitusi Meiji: Dasar Kekaisaran Jepang	
Era Modern .....	14
2.2.2. Konstitusi 1947: Awal Hadirnya Pasifisme .....	15
2.3. Potensi Ancaman: Berkembangnya Tiongkok dan Ancaman Korea	
Utara .....	17
2.3.1. Potensi Ancaman: Ambiguitas Istilah Potensi	
Ancaman .....	17
2.3.2. Awal Mula Restrukturisasi Militer Jepang dari	
Masa ke Masa .....	18
2.3.3. Awal Inisiasi Interpretasi dan Peran JSDF .....	19

2.3.4. Dinamika Implementasi Pasal 9 .....	20
2.3.5. Era Baru: Kepemimpinan Shinzo Abe dan Yasuo Fukuda .....	22
2.3.6. Dinamika Politik di Asia Timur .....	23
2.3.6.1. Korea Selatan: Konflik Kepulauan Takeshima .	25
2.3.6.2. Ekspansi Militer Tiongkok .....	28
2.3.6.3. Ancaman Nuklir Korea Utara .....	28
2.3.6.4. Pengusiran Militer Amerika Serikat .....	29

### **BAB III REINTERPRETASI PASAL 9 KONSTITUSI 1947: WAR ON TERROR ATAU USAHA EKSISTENSI JEPANG ..... 31**

3.1. Jepang dan Reinterpretasi Pasal 9: War on terror atau Usaha Eksistensi Jepang? .....	31
3.1.1. <i>War on Terror</i> Amerika Serikat dan Kehadiran National Defense Program Guidelines (NDPG) Baru .....	32
3.1.2. Titik Balik War on Terror Jepang .....	34
3.1.3. Hadirnya ISIS di Asia Tenggara .....	36
3.2. Potensi Ancaman: Berkembangnya Tiongkok dan Ancaman Nuklir Korea Utara .....	38
3.2.1. Berkembangnya Tiongkok Menjadi Aktor Penting dalam Politik Internasional: Ancaman atau Anugerah Bagi Jepang? .....	38
3.2.2. Korea Utara: Imminent Threat .....	42
3.3. Meningkatnya Kemampuan Ekonomi, Pengaruh, dan Rasa Nasionalisme Jepang .....	43
3.3.1. Kebangkitan Rasa Nasionalisme Jepang .....	46
3.4. Peran Jepang dalam Propaganda <i>Global War on Terror</i> .....	47
3.4.1. Hubungan Jepang-AS dalam <i>War on Terror</i> AS .....	47
3.4.2. <i>War on Terror</i> di Asia Tenggara.....	48
3.4.3. <i>Proactive Contribution to Peace</i> : Program Baru dan Visi Jepang Demi Stabilitas Kawasan .....	49
3.4.3.1. Munculnya Permasalahan dalam Berperannya	

	JSDF an Konflik Antar Kelompok di Jepang	
	Terkait Peran JSDF .....	50
3.4.3.2.	Tantangan Kaum Progresif atas	
	Kecenderungan Politik Parlemen .....	52
3.4.4.	Sayap-Sayap Teror di Jepang: <i>Imminent Threat</i> II .....	54
3.4.4.1.	Aum Shinrikyo: Teror Gas Sarin .....	54
3.4.4.2.	Dr. Hassan Ko Nakata dan Saifullah Ozaki:	
	Afiliasi ISIS dari Jepang? .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
4.1.	Simpulan .....	58
4.2.	Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA		



## ABSTRAKSI

Isu keamanan internasional menjadi perhatian pemerintah Jepang pada era Shinzo Abe. Setelah demiliterisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca PD II, Jepang hanya dapat menggantungkan pertahanan dan keamanannya pada militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Okinawa Air Force Base, Okinawa dan juga mereka hanya memiliki polisi yang hanya merupakan kekuatan kecil untuk menjaga keamanan. Kapasitas Jepang untuk membangun kekuatan militernya dikekang oleh Pasal 9 Konstitusi 1947 yang melarang Jepang untuk menggunakan kekuatan militernya dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konstitusi tersebut dibuat oleh AS sebagai negara pemenang Perang Dunia II, untuk melucuti semua kapasitas militer Jepang. Dengan adanya konstitusi tersebut, negara Jepang yang tadinya bersifat ekspansionis-imperialis, beralih menjadi negara yang pasif yang selalu menekankan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Pada tahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe mengungkapkan bahwa proses reinterpretasi konstitusi sedang berlangsung dan sedang dibahas dalam parlemen dengan mengangkat reinterpretasi Pasal 9 yang pertama kali mengizinkan Jepang untuk mengerahkan militernya jika sekutu membutuhkan.

*kata kunci: reinterpretasi, pertahanan, terorisme, potensi ancaman*

## ABSTRACT

International Security issue has been a huge concern to Japan under the administration of Shinzo Abe. After the demilitarization of the Japan by the United States and the allies on World War II, Japan can only rely on the United States military base in Okinawa, and some other kind of police to protect themselves. Japan's intend to strengthen its military capacity and power was outlawed due to Article 9 of the Japanese 1947 Constitution that restricts Japan to use any form of military power to solve any kind of dispute that taken place on their territory. The Constitution was made by the United States and the allies as the victorious side of the World War II to disarm all of Japan's military capacity and power. With that constitution (especially Article 9), Japan was changing from an expansionist-imperialist into a peaceful country that uses any form of negotiation to solve any kind of dispute that they've faced. But on 2014, Prime Minister Shinzo Abe and his administration unveils that reinterpretation of the Article 9 is happening and being discussed at the parliament to allow Japan's Self Defense Force (JSDF) (for the first time) helps the allies if they needed some, to support War on Terror propaganda by the United States.

*keywords: reinterpretations, defense, terrorism, potential threat*

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1. Gambar Kepulauan Takeshima .....	27